

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil analisis permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Kupang yang dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) rata-rata selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2017-2021 sebesar 15,09% yang dikategorikan kurang sedangkan proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PBHPB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 2,44% dengan kriteria sangat kurang. Dan proporsi Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah 3,33% kriterinya sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap pemerintah pusat masih sangat besar atau dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal Kota Kuapang masih tinggi, atau dapat dikatakana bahwa kota kupang belum mandiri, karena besarnya peran pemerintah pusat dalam membantu membiayai belanja daerah kota Kupang yang tidak bisa dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

#### **5.2. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian dijejaskan sebagai berikut:

Teori Andarini Agus Triyaningsih (2009) dengan judul “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang tahun 2004-2008” dengan hasil derajat desentralisasi fiskal Kota Malang berada pada kategori yang rendah. Hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal kota Malang rata-rata selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008 sebesar 13,05% dihitung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total

Pendapatan Daerah (TPD), Sedangkan proposi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 9,00%. Proporsi Sumbangan (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah dalam kurun waktu lima tahun sebesar 8,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang masi sangat bergantung pada Pemerintah Pusat atau dengan artian lain Desentralisasi Fiskal kota Malang tinggi atau belum mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri.

Penelitian dilakukan juga oleh: Supriyadi (2013) dengan judul “analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo” Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Untuk Pendapan Asli Daerah (PAD) Rata- rata derajat desentralisasi fiskalnya sebesar 9,247% yang berarti sangat kurang dilihat dari kriteria penilaian kemandirian keungan. Dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak walau derajat desentralisali fiskalnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,434% namun masi dalam kategori kurang. Sedangkan untuk Sumbangan atau Bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah malah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskalnya pendapatan asli daerah, yaitu hanya sebesar 3,187% atau sangat kurang.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas, maka penelitian dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah kota Kupang

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka diharapkan pemerintah kota Kupang kedepannya mampu menggali setip potensi pendapatan daerah untuk dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Serta perlu adanya perbaikan pengelolaan dan penagihan dengan tetap dibaringi dengan mendorong peningkatan lanjutan investasi di daerah sehingga daerah mampu berkembang dengan baik dan menjadi lebih mandiri dalam membiayai

urusan rumah tangganya sendiri. Terutama pada komponen PAD yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan memiliki persentase terendah, diharapkan agar pemerintah lebih lagi mengembangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di kota Kupang, sehingga kota Kupang mampu lebih baik lagi dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat.